KEBEBASAN PERS PERSPEKTIF MARXIST THEORY: STUDI TERHADAP KONSTRUKSI BERITA KONFLIK ACEH

Rizqi Wahyudi
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Jl. Medan-Banda Aceh, Alu Awe, Km. 277, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh.
rizqiwahyudi@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang kebebasan pers dan pemberitaan tentang konflik Aceh di media massa perspektif Marxist Theory. Hegemoni pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia masa konflik Aceh mempengaruhi kegiatan jurnalistik. Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan Pers ternyata tidak signifikan memberikan peluang untuk kebebasan jurnalis dalam meliput berita. Banyak kasus tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM luput dari liputan media massa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari analisis berita dan wawancara dengan para Jurnalis yang bertugas saat konflik Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berita tentang konflik Aceh dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Meskipun tidak ada aturan tertulis, namun setiap wartawan diwajibkan memliki ID Card khusus yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer Aceh (PDMA). Wartawan juga sering diingatkan untuk tidak membuat berita terlalu vulgar. Bahkan ada Maklumat PDMA Nomor 5 Tahun 2003 yang isinya melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM sebagai narasumber berita. Media massa saat itu gagal menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengawal penerapan operasi Darurat Militer di Aceh. Produksi berita tersebut mempengaruhi realitas sosial politik masyarakat Aceh. intinya ideologi dan kekuasaan mempengaruhi produksi berita.
Kata kunci : Kebebasan Pers, Konflik Aceh, Media Massa, dan Marxisme

Abstract: This article aims to explain press freedom and reporting on the Aceh conflict in the mass media from a Marxist Theory perspective. The government's hegemony to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia during the Aceh conflict affected journalistic activities. The Press Law Number 40 of 1999 concerning Press Freedom does not provide significant opportunities for journalists' freedom in covering news. Many cases of acts of violence and human rights violations escape the mass

media coverage. This study uses a qualitative method with data sources from news analysis and interviews with journalists who served during the Aceh conflict. The results showed that news about the Aceh conflict was influenced by government intervention. Although there are no written rules, every journalist is required to have a special ID Card issued by the Aceh Military Emergency Authority (PDMA). Journalists are also often reminded not to make news too vulgar. There is even a PDMA Edict Number 5 of 2003 which prohibits journalists and media in Aceh from using GAM as news sources. The mass media at that time failed to carry out the function of social control to oversee the implementation of Martial Law operations in Aceh. The production of this news affects the socio-political reality of the Acehnese people. essentially ideology and power influence news production.

Keywords: Press Freedom, Aceh Conflict, Mass Media, and Marxism

Pendahuluan

Penelitian ini berusaha membahas secara ilmiah terkait produksi berita tentang konflik Aceh di media massa. fokus penelitian terhadap pemberitaan organisasi Gerakan Aceh Merdeka atau disebut juga National Liberation Front Aceh Sumatera (NLFAS),[6] di media massa yang ditinjau melalui pendekatan *Marxist Theory*. Teori Marxisme klasik, menganggap bahwa sebuah media yang dikuasai oleh segelintir elit penguasa telah menyebabkan patologi atau penyakit sosial. Asumsi ini menyakatakan bahwa muatan dari media adalah komoditas yang dijual di pasar dan informasi yang disebarluaskan dikendalikan oleh apa yang pasar akan tanggung. Media dan keberadaannya merepresentasikan suatu masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Jeffres[7] dalam "*The mass media can 'reflect society' in a multitude of ways* bahwa media dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Vincent Moscow, ekonomi politik dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang diwujudkan dalam bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya alam. Ada hubungan timbal balik antara sumber daya yang digunakan dalam proses produksi komunikasi, seperti surat kabar atau buku atau produksi video atau film, dan khalayak utama di mana interaksi ini muncul.[8]

[6] Teungku Hasan M. Di Tiro, *The Price Of Freedom:The unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro*, National Liberation Front Of Acheh Sumatra, 1984, h. 19

[7] Jeffres, "*The mass media can 'reflect society' in a multitude of ways*", 1968, h. 14

[8] Vincent Moscow, *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. University of Winconsin Press, 1998. h. 25

Kehadiran GAM yang didirikan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 telah menimbulkan konflik. Konflik Aceh ini merupakan salah satu dari beberpa konflik yang terjadi di Indoneisa. Pada tahun 1997-2000, serangkaian konflik terjadi mengatasnamakan agama dan etnis. Alasan di balik banyak konflik tersebut, seperti perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan.[9] GAM adalah salah satu dari bagian konflik tersebut. Namun dalam berbagai pemberitaan, GAM di media massa diberitakan secara negatif. Organisasi ini disebut sebagai sparatis dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Di Gunung Halimon, Pidie, Aceh, Hasan Tiro mendirikan GAM pada tahun 1976. Aceh telah menjadi medan perang selama lebih dari 30 tahun akibat kehadiran gerakan ini. Pertempuran yang berlangsung selama tiga dasawarsa itu menarik perhatian dunia internasional yang dimaknai sebagai kegagalan pemerintah Indonesia dalam memperlakukan rakyat Aceh secara tidak adil.[10] Konflik antara Indonesia dan GAM berakhir pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, dengan ditandatanganinya kesepakatan damai. Para pengamat dan pakar menawarkan berbagai sudut pandang tentang peristiwa yang menyebabkan terciptanya konflik di Aceh. Pemberontakan tersebut, menurut Munawar A Djalil, dilakukan oleh Hasan Tiro yang menjabat sebagai deklarator Gerakan Aceh Merdeka, karena meyakini secara historis dan yuridis Aceh adalah negara berdaulat.[11]

Proklamasi kemerdekaan Aceh, yang oleh Hasan Tiro disebut sebagai "Reproklamasi Kemerdekaan Aceh", menginspirasi Hasan Tiro untuk mendirikan GAM sebagai cerminan dari pernyataan tersebut. Berdasarkan kesaksian Hasan Tiro, Aceh memiliki kehadiran politik dan merupakan negara berdaulat jauh sebelum Indonesia dimulai. Oleh karena itu, tidaklah tepat mengartikan proklamasi Aceh Merdeka sebagai upaya untuk mendirikan negara baru, melainkan sebagai penegasan bahwa Aceh sebenarnya adalah suatu kesatuan yang merdeka sebelum berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara.[12]

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan Hasan Tiro untuk mendeklarasikan kemerdekaan Aceh melalui GAM adalah ketidakadilan yang

[9] Andi Faisal Bakti, Major Conflicts in Indonesia: How Can Communication Contribute to a Solution, Jurnal Human Factor Studies, Volume 6, nomor 02 (2000), pp. 33-56.

[10] Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion*, (New York: Cornell Modern Indonesia Project,1995), h. 84

[11] Munawar A. Djalil, *Hasan Tiro Berontak: Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial,* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009), h. 3.

[12] Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro From the Imagination of an Islamic State to the Imagination of Ethnonationalism* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Acheh Future Institute (AFI), 2010, h. 16

dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam Aceh, konflik antara budaya neo-kolonial pemerintah Indonesia dan praktik Islam konservatif di Aceh. masyarakat Aceh, serta semakin banyaknya pendatang Jawa yang masuk ke Aceh.[13] Menurut Hasan Tiro, sebelum masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh adalah republik Islam dan anggota Khilafah Islamiyah, yang memelihara hubungan kerjasama dengan negara-negara Islam lainnya, seperti Khilafah Utsmaniyah. Banga Aceh pada saat itu telah menetapkan dan menegakkan hukum Syariah Islam sebagai dasar negara.[14] Hal ini yang menginspirasi Hasan Tiro untuk mengembalikan kejayaan Islam yang disebutnya dengan (*successor state*). GAM yang dideklarasikan oleh Hasan Tiro juga mendapat dukungan masyarakat, aktivis mahasiswa, akademisi dan ulama. Sementara itu pemerintah pusat melakukan propaganda melalui media massa dengan pemberitaan negatif terhadap GAM demi menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini fokus pada berita tentang GAM yang dikonstruksi atas intervensi kekuasaan negara. Sebuah penelitian menggunakan pendekatan marxis dalam studi media.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu jurnalis yang pernah melakukan liputan saat konflik Aceh berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Teori Marxisme

Sepanjang sejarah, media telah terikat dengan kekuatan ekonomi dan politik. Pertarungan antar media untuk mendapatkan akses kapitalisasi dari kreasi media menjadi bukti dari fakta ini. Selanjutnya, media tunduk pada

[13] Kristen E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM) Anatomy of a Separatist Organization*, (Washington: East. Center Washington, 1998), h. 30. Lihat juga Nuraini, Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer, Disertasi UIN Jakarta, 2015, h. 7. Lihat juga, Edward Aspinall, *Islam and Nation, Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia,* (Singapore: National University of Singapore Press, 2009), h. 7, lihat juga, Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 70.

[14] Tengku Hasan M. di Tiro, Perkara & Alasan Perjuangan Angkatan Acheh - Sumatera Merdeka, Ceramah Dimuka Scandinavian Association Of Southeast Asian Social Studies Göteborg, Sweden, 23 Agustus, 1985.

peraturan politik, ekonomi, dan hukum, dan media pada umumnya dianggap sebagai senjata kekuasaan negara dengan kapasitas untuk memberikan pengaruh dalam berbagai cara. Dalam upaya membangun hubungan yang jelas antara ideologi masyarakat dan media, banyak gagasan telah dikembangkan. Saat melakukan kajian teoretis tentang media massa yang merupakan subjek penting, tidak jarang kesulitan yang berkaitan dengan paradigma dan perspektif yang beragam lebih diutamakan daripada menunjukkan dan menjelaskan bagaimana sebuah media beroperasi.

Untuk meneliti lebih jauh persoalan ini, Bannet[15] misalnya, memulai dari istilah-istilah penting yang terkait dengan media tertentu, yaitu: "massa", "media", dan "komunikasi". Dari sini ditemukan satu cara menghubungkannya ke dalam satu proses dan hubungan sosial politik yang lebih luas. Karenanya, tujuan yang ingin dicapai Bennet adalah menelusuri beberapa isu yang lebih luas yang menjadi dasar pertanyaan sederhana di sekitar penamaan, identifikasi esensi dugaan dan perkiraan yang telah mempengaruhi cara dalam mengkaji media.

Marx menggunakan konsep ideologi untuk membantu menjelaskan bagaimana kelas kapitalis mampu melindungi dan melestarikan kepentingan ekonomi, bahkan selama bertahun-tahun kerusuhan dan upaya revolusi. Marxisme melihat ini mengarah pada kesalahan representasi mendasar dari kondisi kehidupan yang nyata, terutama pekerjaan yang dibayar. Merekalah yang memiliki alat-alat produksi yang dengan demikian, juga mengendalikan alat-alat produksi dan mengedarkan ide-ide politik utama dalam tatanan sosial. Ini dikatakan sebagai kunci mengapa wacana mendominasi masyarakat mana pun (sekarang didominasi oleh media) mewakili isu-isu politik yang luas seperti yang mereka lakukan. Ini menyiratkan bahwa kelas pekerja perlu mengembangkan ide-ide dan imajinasinya sendiri, dan berjuang untuk cara menyebarkannya, jika ia berhasil menentang pemerintahan kapitalis.[16]

Untuk studi media dan budaya, istilah 'hegemoni' Marxis Gramsci Italia diambil sebagai cara utama untuk berpikir tentang bagaimana sistem nilai dominan berubah. Gramsci menekankan hubungan mereka dengan budaya yang hidup sehari-hari dan ke 'akal sehat' yang ia lihat memiliki inti 'akal sehat' yang perlu dikembangkan dalam upaya 'membuka kedok' realitas masyarakat yang terbagi kelas dan berjuang dengan sukses untuk perubahan. Dalam

[15] Bennet, Tony. "*Theories of the Media, Theories of Society*" dalam Michael Gurevich, et.al., 1985, h. 30-35

[16] Gill Branston & Roy Stafford, The Media Student**'s** Book. New York: Routledge, 2010, h. 202

pandangan Marx, ekonomi tempat eksplotasi dan juga perbedaan kelas[17]. Teori Marxisme Karl Marx adalah sebuah paradoks yang tidak hanya menimbulkan banyak interpretasi dan penentang, tetapi juga banyak interpretasi di antara mereka yang memuja, mempercayai, dan menerapkannya. Tidak hanya itu, nasib yang sama menimpa pendiri organisasi, Karl Marx, yang digambarkan sebagai "dari buaian sampai liang lahat, kehidupan Marx sendiri penuh dengan kontradiksi." Namun, Karl Marx, pendiri Marxisme, percaya bahwa revolusi politik akan menggulingkan tatanan kapitalis dan mengantarkan masyarakat sosialis yang akan terwujud untuk meningkatkan standar hidup keseluruhan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia.[18]

Post-Marxisme

Memang, perspektif Marxis ini tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas perkembangan beberapa benih terpenting teori sosial selama abad kedua puluh. Dari konsep Karl Marx dan Friederich Engels, muncul suatu gerakan pemikiran yang membebaskan sekaligus menentang tatanan yang mapan dalam masyarakat kontemporer. Tampaknya aliran pemikiran ini berdampak pada semua bidang ilmu sosial, termasuk komunikasi.[19] Beberapa perubahan historis telah mempengaruhi kekuatan teori Marxis 'klasik': Runtuhnya sosialisme negara blok Timur dari tahun 1989 sangat mengganggu bagi mereka yang mengira negara-negara tersebut telah mewujudkan ide-ide Marxis.[20]

Kekuatan baru dari penekanan dan kebijakan 'pasar bebas' atau 'neoliberal', dari tahun 1970-an, telah merasuki sebagian besar wilayah kehidupan. Ini bisa dibilang memiliki teori media yang setara: kecenderungan hanya untuk merayakan kekuatan audiens dalam kaitannya dengan media, seolah-olah media perusahaan tidak dipertanyakan, dan batas-batas yang mereka tetapkan untuk beragam hasil media, dan untuk aktivitas audiens. Marx mengajarkan bahwa cara-cara produksi di dalam masyarakat akan

[17] Jackson, Robert &. Sorensen, Georg, ***Introduction to International Relations,*** Oxford University Press.1999, h. 238

[18] Bruchill, Scott & Linklater, Andrew. Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung. Nusa Media, 2009, h. 161

[19] Bottomore, Tom dan Armand Mattelart. 1989. "Marxist Theories of Communication" dalam ***International Encyclopedia of Communication***. Vol 2. Edited by Erik Barnow dkk New York: Oxford University Press, h. 476-483.

[20] Gill Branston & Roy Stafford, The Media Student**'s** Book. New York: Routledge, 2010, h. 206

menentukan sifat masyarakat tersebut.[21] Inilah gagasan pokok pemikiran Marx, yakni ***base-superstructure relationship.***

Perubahan-perubahan semacam itu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan, meskipun kekuatan dan kelemahan Marxisme bisa hilang ketika ditinggalkan sebagai suatu pendekatan. Berbicara tentang satu ideologi dominan, yang berkaitan langsung dengan kekuatan ekonomi, menyiratkan suatu kelas penguasa yang bebas dari argumen, yang dapat dengan lancar 'membuat' kita semua sejalan dengan kepentingannya.[22] Dalam teori kritis, konsep ideologi menjadi semakin esensial. Persepsi individu dan kolektif dunia dipandu oleh ideologi mereka, yang merupakan kumpulan keyakinan yang merupakan realitas kelompok, sistem representasi atau kode makna.[23]

Karena dominasi satu ideologi atas yang lain, teori Marxis memandang masyarakat sebagai lapangan bermain di mana berbagai kepentingan bersaing satu sama lain. Hegemoni adalah proses dominasi di mana satu ideologi menumbangkan atau mengkooptasi yang lain, dan itu didefinisikan sebagai berikut: Ini adalah proses di mana satu kelompok dalam masyarakat mencoba untuk menggunakan kekuasaan atas kelompok lain dengan paksaan. Antonio Gramsci, seorang sarjana Marxis dari Italia, mengungkapkan topik ini dengan cara yang brilian.[24] Dennis Mumby[25] telah mengembangkan teori persuasi – hegemoni dalam organisasi yang sangat efektif dalam menggambarkan proses ini. Mumby menunjukkan bagaimana organisasi dapat berubah menjadi tempat di mana kekuatan hegemoni mungkin muncul. Satu ideologi, yang lebih dominan dari yang lain, bertanggung jawab untuk mempertahankan kekuasaan di dalam organisasi. Neo-Marxisme adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada upaya yang dilakukan selama dan setelah Perang Dunia II untuk menunjukkan keabsahan kategori Marxis dalam memahami kondisi perubahan akumulasi modal, upaya yang dilakukan baik selama dan setelah perang. Dengan menggunakan perspektif Marxis, aliran ini mencoba untuk mengkritik perkembangan saat

[21] Littlejohn, Stephen W. ***Theories of Human Communication. USA: Wadsworth*** 2001, h. 210

[22] Gill Branston & Roy Stafford, The Media Student**'s** Book. New York: Routledge, 2010, h. 208

[23] Hall, Stuart. Ideology" dalam ***International Encyclopedia of Communication***. New York: Oxford University Press. 1989. 307-311

[24] Gramsci, Antonio, ***Selections from the Prison Noetbooks.*** Terj. Q Hoare dan G. Nowell Smith. New York: International, 1971, h. 85

[25] Mumby, Dennis K., ***Communication and Power in Organizations: Discoures, Ideology and Domination***. Norwood,NJ: Ablex, 1988, h. 78

ini dan membangun teori yang mengartikulasikan kontribusinya terhadap tren global. [26]

Pembahasan

Alasan Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka dalam Persfektif Media Tirto.co pasca damai

Dalam perspektif media Tirto.co bahwa perjuangan GAM adalah romantisme kejayaan Aceh masa lalu. Setelah dideklarasikan pada 4 Desember 1976 di gunung Halimon Pidie, GAM secara resmi menyatakan perlawanan kepada pemerintah Indonesia. Visi GAM adalah mendirikan kembali Aceh sebagai negara berdaulat sebagaimana romantisme masa lalu ketika Aceh berdiri sebagai negara independen. Menurut Tirto.co, GAM telah menyatakan dengan tegas bahwa penyerahan kedaulatan Aceh dari kolonialis Belanda kepada kolonialis Jawa adalah ilegal. Romantisme kedaulatan Aceh yang dibanggakan oleh GAM adalah pada saat kejayaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda.

Denies Lombard mengatakan bahwa Aceh sangat sejahtera pada masa kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Bahkan, Aceh merupakan salah satu kerajaan Asia pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Negara Belanda, dan merupakan kerajaan Asia pertama yang melakukannya. Sulit untuk tidak bernostalgia ketika mengingat kembali hari-hari indah itu. Saat itu, Islam telah memantapkan dirinya sebagai dasar kerajaan Islam Aceh Darussalam, dan Nusantara, khususnya di Sumatera dan Malaya, telah berhasil membangun peradaban budaya Islam yang tinggi berdasarkan Islam.[27] Menurut Hasan Tiro, Aceh sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara Islam dan anggota Khilafah Islamiyah yang memiliki hubungan kerjasama dengan negara-negara Islam lainnya seperti khilafah Turki Usmaniyah. Aceh pada masa itu telah melaksanakan dan menegakkan hukum Syariah Islam sebagai dasar negara.[28] Namun di sisi lain, seperti diungkap Otto Syamsuddin Ishak dalam Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme, orang Aceh merasakan kegetiran pada saat bersamaan ketika menyaksikan realitas Aceh

[26] Baylis, John & Smith, Steve, ***the Globalization of World Politics***. 2nd edition. Oxford 2001, h. 216

[27] A Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 20.

[28] Tengku Hasan M. di Tiro, Perkara & Alasan Perjuangan Angkatan Acheh - Sumatera Merdeka, Ceramah Dimuka Scandinavian Association Of Southeast Asian Social Studies Göteborg, Sweden, 23 Agustus, 1985.

mutakhir. Romantika kegemilangan masa lalu hadir serempak bersama pengalaman kepahitan menghadapi konflik berkepanjangan yang hanya diselingi jeda relatif singkat.

Sementara Michael L. Ross,[29] menuliskan bahwa salah satu motivasi utama Hasan Tiro selama bergerilya bersama GAM adalah isu kedaulatan sumber daya alam Aceh. Ini juga sekaligus dijadikan strategi penarikan dukungan massa. Masih dalam deklarasi perlawanannya, Tiro mengatakan Aceh kian miskin di bawah kolonialisme Indonesia karena angka harapan hidup berada di angka 34 tahun dan terus menurun. Ia juga mengkritik Jakarta yang tak tahu terima kasih karena sejak merdeka telah menerima pendapatan yang luar biasa besar dari eksploitasi gas alam Aceh. Nilainya diklaim mencapai $15 miliar per tahun, yang dikecam Tiro hanya untuk membangun Jawa.

Menurutnya, GAM menyebarkan propaganda bahwa Gas alam dan sumber daya lainnya di Tanah Rencong dieksploitasi di depan mata masyarakat adat, yang tidak menerima apa-apa dan tetap miskin, sementara para pendatang semakin kaya. Propaganda ini terbukti efektif, dan perekrutan khususnya berhasil di antara target laki-laki di bagian pedesaan. Respons pemerintah Indonesia terhadap Separatisme gelombang kedua lebih brutal dari yang pertama. Hingga pertengahan 1990-an, 200-750 pasukan GAM melawan tentara Indonesia yang jumlahnya berkali-kali lipat. Aceh juga dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) oleh pemerintah Indonesia yang menempatkan tentara khusus anti teroris di wilayah tersebut. Intensifikasi pertarungan meningkatkan jumlah orang yang terluka, diusir dari rumah mereka, dan terbunuh, sementara pada saat yang sama membuat jumlah orang yang terbunuh dan terluka lebih besar daripada gelombang perlawanan pertama. Warga yang telah diklasifikasikan sebagai pengkhianat oleh dua pihak yang berperang adalah orang-orang yang menanggung beban penderitaan. Menurut berbagai laporan, seluruh korban tewas berkisar antara 2.000 dan 10.000 orang, termasuk anggota kelompok milisi dan warga sipil. Korban sipil meningkat sebagai akibat dari sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dua kelompok yang bertikai selama konflik. Menurut Tirto, "kekayaan alam Aceh untuk rakyat Aceh" telah menjadi alat propaganda GAM yang paling efektif untuk merekrut pasukan sejak 1976.

Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat beberapa wacana tentang GAM dan Hasan Tiro yang dikontruksi oleh Tirto.co. GAM dan Hasan

[29] Michael L. Ross, Understanding Civil War: Evidence and Analysis: Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia, 2005.

Tiro dianggap oleh Tirto sebagai kelompok yang melakukan pemberontakan karena gagal mendapatkan proyek Exxon Mobil. GAM juga dianggap sebagai kelompok yang kerap melakukan propaganda dan intimidasi serta melakukan pembunuhan dan penembakan. Sementara kekejaman rezim saat itu tidak dimunculkan secara signifikan. Padahal fakta dilapangan, begitu banyak pelanggaran HAM yang terjadi akibat operasi militer menumpas GAM.

Kebebasan Pers dalam Reportase Konflik Aceh

Konflik Aceh yang berlangsung hampir 30 tahun lebih menyisakan berbagai persoalan. Dalam perspektif media massa, wartawan dibatasi secara halus oleh pemerintah melalui Penguasa Darurat Militer Aceh. Liputan tentang konflik Aceh tidak boleh ditulis sesuai selera wartawan. Karena setiap berita yang dimuat akan mendapatkan respon dari pihak yang berkonflik. Baik pihak TNI maupun GAM akan memantau isi dari berita yang ditulis oleh wartawan yang bertugas di Aceh pada masa konflik. Konflik antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia ini menjadi ladang berita yang selalu saja menarik untuk ditulis. Bahkan masyarakat terkadang menunggu informasi terkait konflik tersebut. Hanya saja, setiap berita telah dikemas dengan baik oleh wartawan demi menjaga stabilitas sosial masyarakat dan juga dirinya.

Masriadi Sambo[30] sebagai wartawan Serambi Indonesia mengatakan bahwa, para wartawan saat itu diwajibkan mengambil kartu identitas pers dari penguasa darurat militer. Jika wartawan tersebut tidak memiliki ID Card khusus dari Penguasa Darurat Militer Aceh, maka tidak bisa meliput berita dan kalau jumpa dengan TNI bisa berbahaya. Seperti yang terjadi pada Mukhtar salah seorang wartawan yang bertugas di Aceh mendapatkan tindakan kekerasan dari TNI karena tidak memiliki ID Card tersebut. Masriadi juga menambahkan bahwa, wartawan biasanya ditelpon oleh pihak yang berkonflik agar tidak menulis berita terlalu keras. Hal ini membuktikan bahwa pers mendapatkan intimidasi dan intervensi, sehingga kebebasan pers tidak lagi bisa berjalan dengan baik.

Zainal Bakri,[31] Jurnalis Metro TV juga menyatakan bahwa saat melakukan peliputan tentang konflik Aceh mereka selalu diikuti oleh intel dari SGI. Memang bertita yang akan dimuat pada media tidak harus dikirim ke penguasa darurat militer untuk disensor. Namun para wartawan selalu diawasi. Sementara para wartawan Asing dibatasi secara ketat. Zainal Bakri

[30] Hasil wawancara dengan Masriadi Sambo, wartawan Serambi Indonesia, di Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2019

[31] Hasil wawancara dengan Zainal Bakri, wartawan Metro TV dan penah menjadi jurnalis Tempo, wawancara by phone tanggal 10 Juli 2019

mengatakan, pernah ada wartawan dari media asing yang diusir saat melakukan peliputan pengepungan anggota GAM oleh TNI. Wartawan media asing dibatasi misalnya dengan alasan keimigrasian.[32]

Zulfikar Syarif,[33] jurnalis Radio Republik Indonesia LPP RRI Lhokseumawe juga mengatakan bahwa, masa darurat militer semua wartawan di Aceh khusunya Lhokseumawe dan Aceh Utara wajib memiliki ID Card dari Koops (Komando Operasi) untuk melakukan liputan. Semua informasi keluar dari satu pintu media center koops. Kalau ada berita yang tidak melalui media center koops akan bermasalah. Secara langsung untuk LPP RRI Lhokseumawe tidak ada intervensi pemerintah, namun ada anjuran untuk menjaga keutuhan NKRI.

Selain itu, TNI telah terlibat dalam kegiatan kekerasan terhadap wartawan yang telah meliput perang Aceh. Nursafri, jurnalis Acehkita, juga mengalami hal serupa. Nursafri memberi tahu bahwa pada malam pertama Darurat Militer, dia dan Alif, seorang reporter Radio 68 H Jakarta, berada di Blang Pidie (sekarang Aceh Barat Daya) ketika mereka menerima kabar bahwa Gunung Ketek telah diserang. Mereka sedang meliput cerita pada saat itu. Seorang Marinir tewas dalam pertempuran itu. Mereka gagal mempertimbangkan kemungkinan bahwa wilayah itu tidak disterilkan di pagi hari sebagai akibat dari apa yang terjadi malam sebelumnya. Sementara itu, mobil wartawan terus berjalan santai ke tempat kejadian. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh intelijen. Saat mereka bersiap untuk pulang, mobil mereka berhenti total. Mereka disuruh turun dari mobil. Nursafri dan teman-temannya banyak yang dipukuli oleh tentara tanpa pemberitahuan sebelumnya. Akhirnya karena tidak terima dipukuli, mereka dipindahkan ke markas Kodim terdekat untuk diproses. Mereka yang memberanikan diri mempublikasikan berita pemukulan itu diancam akan dibunuh oleh pihak berwenang. Nursafri mengenang ucapan prajurit itu kepadanya, "Kami tentara, dan jika Anda mengatakan damai, maka damai," seolah-olah itu terjadi kemarin. Anda akan berbicara lebih banyak di masa depan, dengan risiko Anda sendiri!.[34]

Kebebasan pers saat konflik Aceh berlangsung memang mendapatkan tantangan berat. Para wartawan sering mendapatkan intervensi dari TNI dan

[32] Hasil wawancara dengan Masriadi Sambo, wartawan Serambi Indonesia, di Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2019

[33] Hasil wawancara dengan Zulfikar Syarif, wartawan RRI Lhokseumawe, wawancara by phone tanggal 10 Juli 2019

[34] Baca laporan khusus Acehkita.co, Dipukul sewaktu meliput sudah biasa, 18 Juli 2016, diakses 12 Juli 2019

juga GAM, bahkan ada sensor langsung dari pihak GAM maupun TNI, seperti diminta dikirimkan berita sebelum dimuat. Bahkan tidak boleh menyebut jumlah korban saat kontak tembak berlangsung.[35] Meliput dan menulis suasana di Aceh semasa pemberontakan GAM saat Darurat Militer diberlakukan tanggal 19 Mei 2003 tidak bebas seperti sekarang ini. Jurnalis dikekang dengan berbagai aturan dari penguasa. Status ini turut berimbas terhadap jurnalis dan institusi pers. Sehari setelah status itu keluar, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) mengumpulkan semua petinggi media dan wartawan di Aceh. Rapat ini untuk membahas ruang gerak jurnalis atau wartawan dalam meliput kondisi Aceh. Hal ini berujung pada dikeluarkannya sebuah aturan yang mengekang kebebasan pers. Maklumat Nomor 5 Tahun 2003 yang isinya melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM menjadi narasumber berita.[36]

Konflik bersenjata yang terjadi antara TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah memakan banyak korban jiwa. Tidak hanya dari kalangan sipil, GAM, dan TNI, bahkan para jurnalis pun menjadi tumbal atas konflik bersenjata itu. Beberapa wartawan tewas dalam konflik Aceh, salah satunya Ersa Siregar, reporter RCTI, yang gugur dalam kontak tembak di pedalaman Aceh Timur pada 23 Desember 2003. Ersa Siregar meninggal karena peluru TNI. Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat membenarkan Ersa meninggal karena peluru tentara. "Kan, Ersa ada di pihak GAM," ungkap Ryamizard, di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2003. Ryamizard Ryacudu, mengatakan kondisi seperti itu sulit dihindari oelh TNI karena Ersa saat itu berada dipihak GAM yang sulit dideteksi oleh TNI.[37]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kebebasan pers saat konflik Aceh berlangsung dikekang oleh penguasa darurat militer. Maklumat yang tidak membolehkan menjadikan GAM sebagai narasumber merupakan salah satu indikasi bahwa eksistensi GAM tidak boleh diketahui oleh masyarakat Aceh. Para jurnalis juga mendapatkan tindakan kekerasan dan intimidasi dari TNI. Bahkan pewarta juga termasuk dalam data korban konflik bersenjata yang pernah terjadi di Aceh.

---

[35] Hasil wawancara dengan Jafaruddin, wartawan Serambi Indonesia, di Lhokseumawe tanggal 12 Juli 2019

[36]Baca Buku, Rindu Tanpa Perang: Pengalaman Wartawan Meliput Konflik Aceh. Lihat, habadayli.com, Kisah Duka Jurnalis Aceh Masa Konflik Dibukukan, diakses tanggal 12 Juli 2019

[37] Baca, Liputan6.com, Kisah Tragis Tewasnya Sang Jurnalis Perang di Aceh, tanggal 29 Desember 2017 diakses 10 Juli 2019

Kesimpulan

Pendekatan konsep Marxisme terhadap media massa menegaskan bahwa teks dan praktik harus dianalisis berdasarkan kondisi sejarah, dan sosial politik dari produksi. Berita tentang GAM dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Kondisi sosial politik masyarakat Aceh saat itu dipengaruhi oleh media massa. Meskipun tidak ada aturan tertulis, namun setiap wartawan diwajibkan memliki ID Card khusus yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer Aceh (PDMA). Wartawan juga sering diingatkan untuk tidak membuat berita terlalu vulgar. Bahkan ada Maklumat PDMA Nomor 5 Tahun 2003 yang isinya melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM sebagai narasumber berita. Media massa saat itu gagal menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengawal penerapan operasi Darurat Militer di Aceh.

Kemudian dalam konsep wacana adalah salah satu inti dari pengembangan teori Post-Marxisme. Wacana menegaskan fakta bahwa setiap struktur social merupakan sesuatu yang memiliki arti yang sangat besar. Fakta sejarah konflik Aceh, pembatasan pers meliput berita konflik Aceh, maklumat tentang tidak boleh menjadikan GAM sebagai narasumber merupakan wacana yang memiliki beragam interpretasi politik atas struktur sosial masyarakat Aceh.

Rekomednasi : Konflik Aceh sudah berakhir sejak ditanda tangani Nota Kesepahaman antara RI dan GAM tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Semoga perjanjian damai ini dapat kekal dan Aceh selalu damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Media massa harus selalu menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam setiap pemberitaan. Kebebasan pers harus dijalankan sesuai amanah Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang kebebsan pers. Negara tidak boleh membatasi ruang gerak para jurnalis dalam meliput berita. Kepada para jurnalis yang bertugas di Aceh, seyogyanya juga menjalankan prinsip jurnalisme damai dengan perspektif jurnalisme dakwah. Konsep komunikasi Islam menjadi solusi bagi wartawan untuk menjaga dan merawat perdamaian di bumi Aceh Darussalam.

Daftar Referensi

A Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

A.K Yacobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1949-1950 dan Peran Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 1998

Ahmad Syafii Maari, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta:

Demokrasi Project, 2012, h. 20

Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro From the Imagination of an Islamic State to the Imagination of Ethnonationalism* Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Acheh Future Institute (AFI), 2010

Amy Gutmann, *Identity in Democracy*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003

Andi Faisal Bakti, Media and Religion: Rodja TV's Involvement in the Civil Society Discourse for Community Development, Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 34(3) 2018

_____, Major Conflicts in Indonesia: How Can Communication Contribute to a Solution, Jurnal Human Factor Studies, Volume 6, nomor 02, 2000

Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Noetbooks*. Terj. Q Hoare dan G. Nowell Smith. New York: International, 1971

Bennet, Tony. "Theories of the Media, Theories of Society" dalam Michael Gurevich, et.al., 1985

Bottomore, Tom dan Armand Mattelart, "Marxist Theories of Communication" dalam *International Encyclopedia of Communication*. Vol 2. Edited by Erik Barnow dkk New York: Oxford University Press, 1989.

Bruchill, Scott & Linklater, Andrew. Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung. Nusa Media, 2009

Cut Maya Aprita Sari, Konflik Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka Dalam Pandangan Marxist Theory,

Dennis K Mumby, *Communication and Power in Organizations: Discoures, Ideology and Domination*. Norwood,NJ: Ablex, 1988

Edward Aspinall, *Islam and Nation, Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia,* Singapore: National University of Singapore Press, 2009

Gill Branston & Roy Stafford, *The Media Student's Book.* New York: Routledge, 2010

Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka; Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000

Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta: tp, 1980

Jackson, Robert &. Sorensen, Georg, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press.1999

John Baylis, & Steve Smith, *the Globalization of World Politics*. 2nd edition. Oxford 2001

Klinken, Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van, Politik Lokal di. Indonesia.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007

Kristen E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM) Anatomy of a Separatist Organization*, Washington: East. Center Washington, 1998

L.A. Kaufffman,"*The Anti-Politics of Identity," Socialist Review*, No.1, Vol. 20, Jan.-March 1990

Michael L. Ross, Understanding Civil War: Evidence and Analysis: Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia, 2005.

Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009

Munawar A. Djalil, *Hasan Tiro Berontak: Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial,* Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009

Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1987

Nuraini, Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer, Disertasi UIN Jakarta, 2015

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2008

Stephen W Littlejohn, *Theories of Human Communication. USA: Wadsworth*, 2001

Stuart Hall, Ideology" dalam *International Encyclopedia of Communication*. New York: Oxford University Press. 1989

Tengku Hasan M. di Tiro, Perkara & Alasan Perjuangan Angkatan Acheh - Sumatera Merdeka, Ceramah Dimuka Scandinavian Association Of Southeast Asian Social Studies Göteborg, Sweden, 23 Agustus, 1985

_____, *The Price Of Freedom:The unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro*, National Liberation Front Of Acheh Sumatra, 1984

Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion*, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1995

Vincent Moscow, *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. University of Winconsin Press, 1998

Wilfred C. Smith, *Islam Modern History,* Princeton N.J: Princeton Univercity Press, 1957

Daftar Rujukan Media dan Internet

Acehkita.co, Dipukul sewaktu meliput sudah biasa, 18 Juli 201

Rindu Tanpa Perang: Pengalaman Wartawan Meliput Konflik Aceh.

Habadayli.com, Kisah Duka Jurnalis Aceh Masa Konflik Dibukukan

Liputan6.com, Kisah Tragis Tewasnya Sang Jurnalis Perang di Aceh, 29 Desember 2017

https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2014/04/28/mengenal-critical-theories-marxist-dan-neo-marxist/
Tirto.co

Daftar wawancara

wawancara dengan Masriadi Sambo, wartawan Serambi Indonesia
wawancara dengan Zainal Bakri, wartawan Metro TV dan penah menjadi jurnalis Tempo
Wawancara dengan Jafaruddin, wartawan Serambi Indonesia
Wawancara dengan Zulfikar Syarif, wartawan RRI Lhokseumawe